



## **GUBERNUR RIAU**

### **P E N G U M U M A N**

**Nomor : 800.2.1/BKD/3440**

#### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 02 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tanggal 29 Juli 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI CPNS DAN UNIT PENEMPATAN (Daftar Terlampir)**

#### **II. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter sub spesialis;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Provinsi Riau dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
  - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/ atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
  - b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian dan sertifikat keterampilan tertentu yang masih berlaku dari pejabat yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
12. Pelamar wajib membuat surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran 4 Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018*). Format surat pernyataan dapat diunduh dilaman: <https://bkd.riau.go.id>;
13. Pelamar wajib membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Gubernur Riau di Pekanbaru yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- oleh calon pelamar. Format surat lamaran dapat diunduh dilaman: <https://bkd.riau.go.id>;
14. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
15. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

### III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
  - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
  - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
  - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
  - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
2. Penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
3. Terdapat jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan Surat Tanda Belajar (STB) sesuai Jabatan yang dilamar, masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR). (**Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 322 Tahun 2024**);
4. Terdapat jenis Jabatan Pelaksana yang memerlukan sertifikat sebagai persyaratan jabatan. (**Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 11 Tahun 2024**).

### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Elektronik/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK). Keterangan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran dapat dilihat pada tautan <https://loker.bkn.go.id/index.php/s/agnXFMdWbri6PZj>;
2. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
  - a. Surat Pernyataan 5 (lima) poin sesuai ketentuan persyaratan umum **Asli** yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp10.000,- oleh calon pelamar dan Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp10.000,- (**format terlampir**);
  - b. Surat lamaran **Asli** yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp10.000,- ditujukan Kepada Gubernur Riau di Pekanbaru (**format terlampir**);
  - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik **Asli** atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) **Asli**;

- d. Sertifikat atau Tangkapan Layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT **Asli** dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- e. Ijazah **Asli** bagi tamatan Perguruan Tinggi/Ijazah **Asli** bagi tamatan SLTA sederajat;
- f. Transkrip Nilai **Asli** bagi tamatan Perguruan Tinggi/Daftar Nilai atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) **Asli** bagi tamatan SLTA sederajat;
- g. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
- h. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan (Sertifikat Kompetensi **Asli**, STR **Asli**).

## V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi:
  - a. Tes Karakter Pribadi (TKP);
  - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - c. Tes Intelegensi Umum (TIU);
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

## VI. KETENTUAN LAIN

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu: PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama;
2. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jenis Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Informasi resmi terkait seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 hanya dapat dilihat pada laman <http://www.bkn.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>;
4. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 3 (tiga) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
7. Untuk mengikuti seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi Helpdesk No. WhatsApp **0877 8327 1024**, **0853 6443 5664** dan **0853 6443 5646** pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Pekanbaru, 21 Agustus 2024



Pj. GUBERNUR RIAU,

Dr. RAHMAN HADI., M.Si

**LAMPIRAN 1 : PENGUMUMAN GUBERNUR RIAU TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI  
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : 800.2.1/BKD/3440  
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2024**

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

No	Jabatan	Kualifikasi pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
A.	<b>Tenaga Kesehatan</b>		<b>22</b>		
1	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-EMERGENSI DAN RAWAT INTENSIF ANAK (ERIA)	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-EMERGENSI DAN RAWAT INTENSIF ANAK (ERIA)	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
2	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS ANAK-NEONATOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
3	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI PEDIATRI DAN CRITICAL CARE	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS ANESTESI-ANESTESI PEDIATRI DAN CRITICAL CARE	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
4	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- FETOMATERNAL (KFM)	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-FETOMATERNAL (KFM)	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
5	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN- OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS OBGYN-OBSTETRI-GINEKOLOGI SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
6	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GASTROENTEROHEPATOLOGI	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-GASTROENTEROHEPATOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
7	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS UROLOGI-PEDIATRIK	PROFESI DOKTER SUB SPESIALIS UROLOGI-PEDIATRIK	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT BIDANG MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PADA DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PADA DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PADA DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	2	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT BIDANG MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN NUKLIR DAN TERANOSTIK MOLEKULER	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	PROFESI DOKTER SPESIALIS MATA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PADA DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN   SEKSI PELAYANAN KLINIS UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	FORMASI UMUM
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT BIDANG MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PENUNJANG MEDIK, PENDIDIKAN DAN PENELITIAN (DIKLIT)	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD PADA DINAS KESEHATAN   DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS SARAF/NEUROLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UPT BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PADA DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK   SEKSI PELAYANAN MEDIK	FORMASI UMUM
20	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	DIPLOMA IV ANALIS KESEHATAN; DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN; DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/ JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/ JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S1 FARMASI PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S1 BIOLOGI; S1 KIMIA; S1 TEKNIK KIMIA; S1 TEKNIK PANGAN; S1 TEKNIK LINGKUNGAN; S1 BOKIMIA; S1 BIOMEDIK; S1 BIOTEKNOLOGI; S1 MIKROBIOLOGI; S2 KIMIA; S2 BOKIMIA; S2 BIOMEDIK; S2 BIOINFORMATIKA; S2 BIOTEKNOLOGI; S2 BIOMOLEKULER; S3 BIOMOLEKULER	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN   SEKSI PELAYANAN KLINIS UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
21	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	DIPLOMA IV ANALIS KESEHATAN; DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN ANALIS KESEHATAN; DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/ JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; DIPLOMA IV / SARJANA TERAPAN PEMINATAN/ JURUSAN/PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK; S1 FARMASI PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S1 PEMINATAN/JURUSAN/ PROGRAM STUDI /KONSENTRASI TEKNOLOGI LABORATORIUM KESEHATAN/ TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS; S1 BIOLOGI; S1 KIMIA; S1 TEKNIK KIMIA; S1 TEKNIK PANGAN; S1 TEKNIK LINGKUNGAN; S1 BOKIMIA; S1 BIOMEDIK; S1 BIOTEKNOLOGI; S1 MIKROBIOLOGI; S2 KIMIA; S2 BOKIMIA; S2 BIOMEDIK; S2 BIOINFORMATIKA; S2 BIOTEKNOLOGI; S2 BIOMOLEKULER; S3 BIOMOLEKULER	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KESEHATAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN   SEKSI PELAYANAN KLINIS UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAN LINGKUNGAN	FORMASI UMUM



No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
<b>B.</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>		<b>58</b>		
1	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH   SUBBIDANG PENERIMAAN DAERAH	FORMASI UMUM
2	EDUKATOR	S-1 ANTROPOLOGI; S-1 ARKEOLOGI; S-1 ILMU SEJARAH; S-1 ILMU KOMUNIKASI	2	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KEBUDAYAAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA   SEKSI PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MUSEUM SANG NILA UTAMA UPT MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA	FORMASI UMUM
3	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK MESIN; D-IV TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL   CABANG DINAS   CABANG DINAS WILAYAH III SIAK SRI INDRAPURA   SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI CABANG DINAS WILAYAH III	FORMASI UMUM
4	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK MESIN; D-IV TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK FISIKA; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL   BIDANG KETENAGALISTRIKAN	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
5	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK MESIN; D-IV TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK ELEKTRO	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL   CABANG DINAS   CABANG DINAS WILAYAH II RENGAT   SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ENERGI CABANG DINAS WILAYAH II	FORMASI UMUM
6	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	SLTA SEDERAJAT; SMK PELAYARAN; SMK PELAYARAN TEKNIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III   SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III	FORMASI UMUM
7	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	SLTA SEDERAJAT; SMK PELAYARAN; SMK PELAYARAN TEKNIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I   SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I	FORMASI UMUM
8	KEPALA KAMAR MESIN KAPAL KELAS V	SLTA SEDERAJAT; SMK PELAYARAN; SMK PELAYARAN TEKNIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II   SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
9	KURATOR	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 ARKEOLOGI; S-1 ILMU SEJARAH	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KEBUDAYAAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA   SEKSI PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN MUSEUM SANG NILA UTAMA UPT MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA	FORMASI UMUM
10	KURATOR	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 ARKEOLOGI; S-1 ILMU SEJARAH	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KEBUDAYAAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA   SEKSI PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUDAYA UPT MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA	FORMASI UMUM
11	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER JARINGAN; D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN; S-1 REKAYASA KOMPUTER; D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER	4	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK   BIDANG PERSANDIAN	3 FORMASI UMUM, 1 FORMASI DISABILITAS
12	NAKHODA KAPAL KELAS V	SLTA SEDERAJAT; SMK PELAYARAN; SMK PELAYARAN NAUTIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I   SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH I	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
13	NAKHODA KAPAL KELAS V	SLTA SEDERAJAT; SMK PELAYARAN; SMK PELAYARAN NAUTIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II   SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH II	FORMASI UMUM
14	NAKHODA KAPAL KELAS V	SLTA SEDERAJAT / SMK PELAYARAN / SMK PELAYARAN NAUTIKA	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III   SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III	FORMASI UMUM
15	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS SOSIAL   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PELAYANAN SOSIAL MARSUDI PUTRA TENGGU YUK   SEKSI REHABILITASI SOSIAL UPT PELAYANAN SOSIAL MARSUDI PUTRA TENGGU YUK	FORMASI UMUM
16	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS SOSIAL   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH   SEKSI PELAYANAN SOSIAL UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
17	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS SOSIAL   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT BINA LARAS   SEKSI REHABILITASI SOSIAL UPT BINA LARAS	FORMASI UMUM
18	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS SOSIAL   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK   SEKSI PELAYANAN SOSIAL UPT PANTI SOSIAL PENGASUH ANAK	FORMASI UMUM
19	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS SOSIAL   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DAKSA   SEKSI PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS UPT PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DAKSA	FORMASI DISABILITAS
20	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS SOSIAL   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH   SEKSI PEMBINAAN SOSIAL UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
21	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; S-1 TEKNIK PENGAIRAN; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S-1 ARSITEKTUR; S-1 PLANOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG CIPTA KARYA	FORMASI UMUM
22	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN; D-IV PLANOLOGI; D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; D-IV TEKNIK SIPIL; D-IV TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PLANOLOGI; S-1 ARSITEKTUR LANSKAP	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG BINA MARGA	FORMASI UMUM
23	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 BAHASA INGGRIS; S-1 HUKUM; S-1 STATISTIKA; S-1 HUKUM BISNIS; S-1 ILMU AKTUARIA; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	FORMASI UMUM
24	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR; S-1 TEKNIK PENGAIRAN; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 PLANOLOGI; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN; S-1 PENGELOLAAN LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG CIPTA KARYA	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
25	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	D-IV PLANOLOGI; D-IV TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG; D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ARSITEKTUR	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	FORMASI UMUM
26	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 KEPERAWATAN; S-1 PSIKOLOGI; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ILMU HUKUM; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KELUARGA SEJAHTERA, DATA DAN INFORMASI	FORMASI UMUM
27	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	FORMASI UMUM
28	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 TEKNOLOGI PANGAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
29	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 KESEHATAN MASYARAKAT	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	FORMASI UMUM
30	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN   SEKSI PENGAWASAN NORMA KERJA, JAMINAN SOSIAL, PEREMPUAN DAN ANAK	FORMASI UMUM
31	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN AHLI PERTAMA	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA; S-1 TEKNIK KIMIA; S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN   SEKSI PENEGAKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	FORMASI UMUM
32	PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM; S-1 PERIKANAN; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; S-1 BIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN	FORMASI UMUM



No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
33	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP	FORMASI UMUM
34	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN); S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA   UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA   SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	FORMASI UMUM
35	PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK; D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK	2	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH   SUBBIDANG PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	FORMASI UMUM
36	PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA	D-IV GEODESI; D-IV GEOFISIKA; D-IV GEOLOGI; S-1 GEOKIMIA; S-1 KIMIA; S-1 FISIKA; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN; S-1 GEOLOGI; S-1 GEODESI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL   BIDANG MINERAL DAN BATUBARA	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
37	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU GAJAH   SEKSI PERLINDUNGAN , KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SULIGI BATU GAJAH	FORMASI UMUM
38	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK   SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK	FORMASI UMUM
39	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI	FORMASI UMUM
40	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS PULAU   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS PULAU	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
41	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN; S-1 ANTROPOLOGI; S-1 HUKUM; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN INDRAGIRI	FORMASI UMUM
42	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPIAPI   SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BAGAN SIAPIAPI	FORMASI UMUM
43	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA   SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MINAS TAHURA	FORMASI UMUM
44	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SINGINGI	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
45	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK   SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SOREK	FORMASI UMUM
46	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAMPAR KIRI	FORMASI UMUM
47	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU   SEKSI PERLINDUNGAN , KSDAE, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAU	FORMASI UMUM
48	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH   SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MANDAH	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
49	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS PULAU   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BENGKALIS PULAU	FORMASI UMUM
50	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TEBING TINGGI	FORMASI UMUM
51	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN   SEKSI PERLINDUNGAN, KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, EKOSISTEM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ROKAN	FORMASI UMUM
52	POLISI KEHUTANAN PEMULA	SMK KEHUTANAN	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   UNIT PELAKSANA TEKNIS   UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TASIK BESAR SERKAP   SEKSI PERLINDUNGAN , KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TASIK BESAR SERKAP	FORMASI UMUM

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Alokasi CPNS	Unit Penempatan	Keterangan
53	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA; S-1 SAINS DATA SPASIAL	1	PEMERINTAH PROVINSI RIAU   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	FORMASI UMUM